

DAFTAR BACAAN

Buku

H S, Salim, *perkembangan hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Hartono, Siti Soemantri, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jogjakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas hukum Universitas Gajah Mada, 1981.

Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) diterjemahkan oleh Soesilo dan Pramudji R, Wipress, Cetakan tahun 2007.

Marzuki, Peter mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Mutiara, Hikmah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Refika Aditama, 2007.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Shubhan, Hadi, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2008.

Sinaga, Syamsudin M, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tata Nusa, 2012.

Situmorang, Victor M. & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.

Sutedi, Adrian, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Usanti, Trisadini Prasastinah & Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Surabaya, PT Revka Petra media, 2013.

Widjaja, Gunawan, Kartini Muljadi, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 7)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 142)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943)

Putusan Mahkamah Agung No. 419 K/ Pdt.Sus/2012

Skripsi dan Tesis

Akbar, Ilham, *kepailitan Pada Perusahaan Join Operation*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

Nemandasari, Dini, *Tanggung Gugat Pihak Penanggung (Borg) dalam Perjanjian Penanggungan Akibat Debitor Wanprestasi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

Widiarso, Arwakhudin, *Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009

Widhijanto, M., *Penolakan Permohonan Kepailitan Debitor yang Telah Memenuhi Syarat Pailit*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2009.

maksud, tujuan serta topik yang dibicarakan menjadi jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun yang membacanya.

